

IMPLEMENTASI PROGRAM GERDU KEMPLING DI KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG

Oleh;
JAUHAR FAISAL RAHMAN

Abstraksi

Kecamatan Pedurungan merupakan salah satu instansi yang melaksanakan kebijakan Gerdu Kempling di wilayah Kota Semarang. Pelaksanaan kebijakan didasarkan pada Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2010 mengenai Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Horn & Van Mater. Sehingga bisa diperoleh gambaran yang tepat mengenai penyelenggaraan program Gerdu kempling di wilayah Kecamatan Pedurungan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif sebagai unit analisis, sedangkan teknik pengumpulan data diperoleh melalui hasil wawancara dengan informan, dokumentasi, dan observasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan program Gerdu kempling di wilayah Kecamatan Pedurungan belum optimal. Hal ini terlihat bahwa beberapa kegiatan berjalan pada saat masa-masa awal pelaksanaan saja, proses pendistribusian produk hasil masyarakat juga belum maksimal.

Kesimpulan yang dapat diperoleh bahwa penyelenggaraan program Gerdu Kempling di wilayah Kecamatan Pedurungan belum optimal. Oleh karena itu perlu adanya konsep sinergitas wilayah. Hal ini berguna sebagai proses penyebaran hasil produksi usaha masyarakat serta diberlakukannya penghargaan bagi masyarakat yang mampu menjadi pelopor dalam pelaksanaan program Gerdu Kempling.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan dan Gerdu Kempling

PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah fenomena global yang sangat memprihatinkan, dari tahun ke tahun masalah kemiskinan ini tidak kunjung surut bahkan cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat serta menurunnya kondisi

perekonomian negara Indonesia. Menurut Tjokrowinoto dalam Sulistiyani (2004) kemiskinan tidak hanya menyangkut persoalan kesejahteraan semata tetapi kemiskinan menyangkut persoalan kerentanan, ketidak berdayaan, tertutupnya akses peluang kerja,

ketergantungan tinggi, dan rendahnya akses pasar.

Kemiskinan merupakan masalah yang pada umumnya dihadapi hampir di semua negara-negara berkembang, terutama negara yang padat penduduknya seperti Indonesia. Dari seminar ke simposium, dari lokakarya ke semiloka, dari model *topdown* ke model *bottom-up*, dan variasinya program intervensi, pada akhirnya tetap menyisakan persoalan seperti ini tidak mampu menekan drastis angka kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah bersama yang harus ditanggulangi secara serius, kemiskinan bukanlah masalah pribadi, golongan bahkan pemerintah saja, akan tetapi hal ini merupakan masalah setiap kita warga negara Indonesia. Kepedulian dan kesadaran antar sesama warga diharapkan dapat membantu menekan tingkat kemiskinan di Indonesia.

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2010 mengenai Percepatan Penanggulanagn Kemiskinan, hingga saat ini Indonesia belum benar- benar terlepas dari

persoalan kemiskinan sejak krisis yang berkepanjangan, oleh karena itu Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) hadir untuk melaksanakan amanah Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) yang menempatkan penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas mendesak untuk segera ditangani. P2KP adalah merupakan program pemerintah yang berupaya menanggulangi kemiskinan melalui konsep pemberdayaan masyarakat dan pelaku pembangunan lokal lainnya, termasuk pemerintah setempat dan kelompok peduli setempat sehingga dapat membangun gerakan kemandirian penanggulangan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan yang bertumpu pada nilai dan prinsip universal. Upaya menanggulangi kemiskinan merupakan usaha yang tidak dapat diselesaikan dalam waktu tertentu. Penanggulangan kemiskinan merupakan suatu proses yang tidak pernah boleh berhenti karena kemiskinan itu sendiri sangat dinamis. Dalam P2KP, masalah kemiskinan dipandang bukan suatu hal yang terjadi dengan sendirinya,

melainkan karena sebagai akibat dari suatu kebijakan.

P2KP sebagai program penanggulangan kemiskinan di perkotaan lebih mengutamakan peningkatan pendapatan masyarakat dengan mendudukan masyarakat sebagai pelaku utamanya melalui partisipasi aktif, melalui partisipasi ini dari masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran tidak hanya sebagai obyek kebijakan, tetapi ikut serta menentukan program yang cocok bagi mereka. Mereka memutuskan, menjalankan, dan mengevaluasi hasil dari pelaksanaan program. Nasib dari program, apakah akan terus berlanjut atau terhenti, akan tergantung pada tekad dan komitmen masyarakat itu sendiri. Sejak dikeluarkannya Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2005 mengenai program penanggulangan kemiskinan pemerintah telah melakukan intervensi percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Komponen intervensinya mencakup tiga hal, yaitu bantuan modal, penyediaan

sarana/prasarana, dan pendamping masyarakat.

Tercatat, tingginya angka kemiskinan di Semarang yang berjumlah 111.558 KK, 398.009 jiwa atau 26,41% dari total warga Semarang. Selama lima tahun kedepan diharapkan angka kemiskinan ini dapat terus ditekan melalui berbagai program terpadu Kota Semarang. Pengentasan kemiskinan salah satunya dilakukan melalui Program Terpadu Penanganan Kemiskinan, Kesehatan, Ekonomi, Pendidikan, Infrastruktur dan Lingkungan atau Gerdu Kempling. Program Gerdu Kempling ini memprioritaskan penanganan kemiskinan di setiap kelurahan yang masih ada warga di bawah garis kemiskinan.

Program Gerdu Kempling tersebut berlaku bagi seluruh Kecamatan Di Kota Semarang. Dan untuk sementara Kelurahan Palebon menjadi proyek percontohan pelaksanaan program bagi kelurahan lainnya. Karena kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Pedurungan ini dianggap menunjukkan *progress* yang

paling baik diantara kelurahan yang lainnya. Meski demikian tidak semua wilayah kelurahan yang ada di Kecamatan Pedurungan belum mampu melaksanakan program dengan baik. Dengan demikian ada asumsi bahwa pola pelaksanaan Gerdu Kempling di Kecamatan Pedurungan belum sepenuhnya berjalan dengan baik.

Untuk mengkaji mengenai proses pelaksanaan program ini selanjutnya menggunakan konsep kajian tentang implementasi kebijakan publik. Karena program Gerdu Kempling ini hingga saat ini masih berlangsung di wilayah Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.

Perumusan Masalah

Untuk mengarahkan penelitian pada data dan fakta ke dalam bentuk penulisan ilmiah, maka diperlukan perumusan masalah dengan jelas, sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan kajian dan pedoman arah penelitian. Setiap penelitian dimulai dari perumusan masalah, yaitu memberikan gambaran ada sesuatu yang perlu diselesaikan atau dipecahkan dalam arti dicari

jawabannya. (Nawawi:1990:42).

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka permasalahan yang menjadi perhatian penulis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana isi kebijakan Program Gerdu Kempling dalam pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang?
2. Bagaimana proses implementasi Program Gerdu Kempling di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang ?
3. Faktor apa yang menjadi pendukung dan hambatan proses implementasi Program Gerdu Kempling di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang?

Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan terhadap suatu masalah pasti mempunyai tujuan tertentu. Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui secara rinci isi kebijakan Program Gerdu

Kempling dalam pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.

2. Untuk mengetahui proses implementasi Program Gerdu Kempling di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, berikut realisasi berdasarkan petunjuk pelaksanaannya.
3. Untuk mengetahui faktor yang menjadi pendukung dan hambatan proses implementasi Program Gerdu Kempling di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.

Kajian Pustaka

Sebagai landasan teori untuk dapat menjelaskan peimplementasian Gerdu Kempling dalam pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, Kec. Pedurungan, Semarang, penulis mengutip beberapa teori para ahli. Menurut Sugiono (2005: 55) kerangka teori merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai factor yang telah didefinisikan sebagai masalah yang penting. Teori adalah konsep- konsep dan generalisasi- generalisasi hasil penelitian yang dapat

dijadikan sebagai landasan teoritis untuk pelaksanaan penelitian.

1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik membahas mengenai soal bagaimana isu- isu dan persoalan- persoalan publik disusun dan didefinisikan, dan bagaimana kesemuanya itu diletakkan dalam agenda kebijakan dan agenda politik.

Pengertian kebijakan menurut Anderson dalam Irfan Islamy (2003:17) diartikan sebagai “*A purposive course of action followed by an actor in dealing with a problem or matter of concern*” (serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).

Mustopadidjaja menjelaskan mengenai kebijakan sebagai berikut: Istilah kebijakan lazim digunakan dalam kaitannya tindakan atau kegiatan pemerintah, serta perilaku negara pada umumnya (Hanif Nurcholis, 2005:158).

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan

adalah serangkaian program atau kegiatan yang harus dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditentukan. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa pelaku kebijakan bisa individu, swasta, maupun pemerintah.

Proses kebijakan publik merupakan serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut nampak dalam serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, dan penilaian kebijakan.

Menurut Holwet dan M. Ramesh (Subarsono, 2005: 13) berpendapat bahwa proses kebijakan publik terdiri atas lima tahapan yang adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan agenda, yakni suatu proses agar suatu masalah bisa mendapat suatu perhatian dari pemerintah.
2. Formulasi kebijakan, yakni proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah.

3. Pembuatan kebijakan, yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan.
4. Implementasi kebijakan, yakni proses untuk melaksanakan suatu kebijakan agar mencapai hasil.
5. Evaluasi kebijakan, yakni proses untuk memonitor dan menilai kinerja atau hasil suatu kebijakan.

Dalam proses implementasi, agar lebih operasional dan siap untuk dilaksanakan, kebijakan diinterpretasikan sebagai program kemudian agar lebih operasional lagi, program dirumuskan sebagai proyek atau program kegiatan, setelah itu diikuti dengan tindakan fisik.

2. Implementasi Kebijakan Publik

Dalam setiap perumusan suatu program selalu diiringi dengan suatu implementasi. Betapapun baiknya suatu program tanpa implementasi yang benar dan baik, maka tidak akan banyak berarti. Suatu program hanyalah rencana bagus di atas kertas jika tidak dapat diimplementasikan dengan baik dan benar. Implementasi

bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan- keputusan politik ke dalam prosedur rutin melalui saluran- saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, implementasi menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari program itu sendiri. Oleh karena itu tidak terlalu salah jika implementasi kebijakan dikatakan aspek yang sangat penting dalam seluruh proses kebijakan.

Masmanian dan Sabatier (Putra, 2003:84) mengatakan bahwa mengkaji masalah implementasi kebijakan berarti berusaha memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program atau kebijakan diberlakukan/ dirumuskan, yakni peristiwa- peristiwa atau kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan, baik yang menyangkut usaha- usaha mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian- kejadian tertentu.

Kemiskinan

Selama ini kemiskinan diasumsikan bahwa orang miskin

dianggap tidak mampu menolong dirinya sendiri. Kemiskinan dianggap sebagai gejala rendahnya kesejahteraan. Kemiskinan adalah ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuasaan social. Basis kekuasaan social meliputi:

1. Modal produktif atau asset (tanah perumahan, kesehatan)
2. Sumber keuangan (kredit, pekerjaan)
3. Organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk kepentingan bersama (koperasi, partai sosial)
4. Jaringan social untuk memperoleh barang, jasa, dan pekerjaan
5. Pengetahuan dan ketrampilan
6. Informasi yang berguna untuk kemajuan hidup.

Kemiskinan menjadi satu lingkaran setan dari kurangnya pendidikan, tingginya pengangguran, rendahnya pendapatan, tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup, menjadi sumber daya yang tidak produktif. Ini diperlukan suatu kebijakan pemecahan yang dicanangkan harus dapat

memecahkan permasalahan yang sebenarnya dihadapi masyarakat miskin.

Di samping itu terdapat juga bentuk-bentuk kemiskinan yang sekaligus menjadi faktor penyebab kemiskinan (asal mula kemiskinan). Ia terdiri dari: (1) Kemiskinan natural, (2) Kemiskinan kultural, dan (3) Kemiskinan struktural (Kartasasmita, 1996: 235, Sumodiningrat, 1998: 67, dan Baswir, 1997: 23).

Kemiskinan natural adalah keadaan miskin karena dari awalnya memang miskin. Kelompok masyarakat tersebut menjadi miskin karena tidak memiliki sumberdaya yang memadai baik sumberdaya alam, sumberdaya manusia maupun sumberdaya pembangunan, atau walaupun mereka ikut serta dalam pembangunan, mereka hanya mendapat imbalan pendapatan yang rendah. Menurut Baswir (1997: 21) kemiskinan natural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor alamiah seperti karena cacat, sakit, usia lanjut atau karena bencana alam. Kondisi kemiskinan seperti ini

menurut Kartasasmita (1996: 235) disebut sebagai “Persisten Poverty” yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun. Daerah seperti ini pada umumnya merupakan daerah yang kritis sumberdaya alamnya atau daerah yang terisolir.

Kemiskinan kultural mengacu pada sikap hidup seseorang atau kelompok masyarakat yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup dan budaya di mana mereka merasa hidup berkecukupan dan tidak merasa kekurangan. Kelompok masyarakat seperti ini tidak mudah untuk diajak berpartisipasi dalam pembangunan, tidak mau berusaha untuk memperbaiki dan merubah tingkat kehidupannya. Akibatnya tingkat pendapatan mereka rendah menurut ukuran yang dipakai secara umum. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Baswir (1997: 21) bahwa ia miskin karena faktor budaya seperti malas, tidak disiplin, boros dan lain-lainnya.

Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor buatan manusia seperti

kebijakan ekonomi yang tidak adil, distribusi aset produksi yang tidak merata, korupsi dan kolusi serta tatanan ekonomi dunia yang cenderung menguntungkan kelompok masyarakat tertentu (Baswir, 1997: 21). Selanjutnya Sumodiningrat (1998: 27) mengatakan bahwa munculnya kemiskinan struktural disebabkan karena berupaya menanggulangi kemiskinan natural, yaitu dengan direncanakan bermacam-macam program dan kebijakan. Namun karena pelaksanaannya tidak seimbang, pemilikan sumber daya tidak merata, kesempatan yang tidak sama menyebabkan keikutsertaan masyarakat menjadi tidak merata pula, sehingga menimbulkan struktur masyarakat yang timpang. Menurut Kartasasmita (1996: 236) hal ini disebut “*accidental poverty*”, yaitu kemiskinan karena dampak dari suatu kebijaksanaan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Masalah-masalah kemiskinan tersebut di atas menurut Nurkese (dalam Sumodiningrat, 1999: 150) sebagai

suatu “lingkaran setan kemiskinan” yang meliputi enam unsur, yaitu : Keterbelakangan, Kekurangan modal, Investasi rendah, Tabungan rendah, Pendapatan rendah, Produksi rendah.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Nawawi (1990:64) bahwa metode deskriptif memusatkan perhatian pada masalah- masalah atau fenomena- fenomena yang ada pada saat penelitian dilakukan atau masalah yang bersifat actual, kemudian menggambarkan fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya diiringi dengan interpretasi.

Lokasi penelitian yang dipilih adalah Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. Tipe penelitian ini adalah kualitatif, maka penentuan jumlah responden yang dijadikan informan ditetapkan dengan menggunakan *key person* dengan teknik *purposive* yaitu, teknik yang terdiri atas sejumlah kecil orang dengan karakteristik-karakteristik yang khusus. Adapun

informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait dengan Lokus Penelitian. Informan kunci (*key informan*) dalam penelitian ini adalah:

1. Camat Pedurungan Kota Semarang
2. Ka. Sie. Kesejahteraan Sosial (Kesos) Kecamatan Pedurungan Kota Semarang
3. Aparatur Kelurahan Palebon.

Untuk menguji ketepatan dan keabsahan data, penulis menggunakan teknik pengujian triangulasi data (triangulasi sumber). Teknik pengujian triangulasi sumber memanfaatkan jenis sumber data yang berbeda-beda untuk menggali data yang sejenis (Sutopo, 2002:79).

Pembahasan

Program Gerdu Kempling merupakan bentuk dari produk Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2010 mengenai Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Dalam rangka Pembangunan Nasional yang sistematis dan berkelanjutan, keberhasilan Implementasi Gerdu Kempling diharapkan mampu menjadi

dasar pelaksanaan program-program pembangunan lainnya.

Implementasi Gerdu Kempling ini pun juga dilaksanakan di wilayah Kota Semarang, khususnya Kecamatan Pedurungan sebagai lokasi dalam penelitian ini.

Program Gerdu Kempling merupakan salah satu wujud kebijakan dari pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di perkotaan. Dasar hukum dari kebijakan ini diantaranya;

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota
3. Perda Kota Semarang Nomor : 4 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang

4. Perda Nomor 12 Tahun 2011 tentang RPJMD Kota Semarang Tahun 2010-2015
5. Keputusan Walikota Semarang Nomor; 465/ 032/ 2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Semarang dan Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Semarang yang diubah dengan Keputusan Walikota Semarang Nomor 400/52 Tahun 2012.
6. Instruksi Walikota Semarang Nomor 054/ 2/ 2011 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Bidang Kesehatan, Ekonomi, Pendidikan, Infrastruktur dan Lingkungan (Gerdu Kempling) Tahun 2011, yang dilanjutkan dengan Instruksi Walikota Semarang Nomor 400/ 1/ 2012.

Dengan dasar hukum ini Pemerintah Kota Semarang melaksanakan program Gerdu Kempling hingga ke tingkat Kecamatan dan Kelurahan. Dan

wilayah Kecamatan Pedurungan menjadi salah satu target atau sasaran dari program Gerdu Kempling ini. Program Gerdu Kempling adalah program yang :

- a. Berkelanjutan / *sustainable*
- b. Dapat diterima masyarakat / *acceptable*
- c. Dapat diadopsi pemerintah pusat maupun daerah / *adaptable*
- d. Transparansi dalam pengelolaan anggaran pemerintah daerah dan dana dari CSR / *transparency*
- e. Efektif dan efisien karena memiliki sasaran yang jelas dan keterpaduan *stakeholder* dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan
- f. Berbasis pemberdayaan seluruh stakeholder dan masyarakat sesuai dengan peran dan kapasitas
- g. Pro rakyat

Hingga saat ini setidaknya sudah terprogram berbagai agenda kegiatan di 4 Kelurahan dari 12 Kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Pedurungan. Diantaranya Palebon, Pedurungan Lor, Muktiharjo Kidul, dan Gemah. Adapun agenda

kegiatan yang sudah berlangsung hingga saat ini dan yang akan segera dijalankan yaitu Ternak Kambing dan Lele, Budidaya Ikan, Usaha Masakan dan Makanan, Pelatihan Rias dan Salon, Perbaikan Saluran Air, Perbaikan Rumah, Pengobatan Gratis.

Dalam Pelaksanaan Gerdu Kempling ini semua dalam bentuk kegiatan langsung di masyarakat, sama sekali tidak ada unsur bantuan secara tunai. Dan Kecamatan Pedurungan menempatkan wewenangnya lebih pada sektor fasilitator dan monitor dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan Gerdu Kempling ini dimulai dari tahap pengumpulan atau verifikasi data baik mengenai keluarga miskin maupun potensi wilayah dan penduduknya. Kemudian perumusan program diikuti oleh alokasi pembiayaan, hingga pelaksanaan teknis di lapangan.

Sesuai dengan petunjuk pelaksanaannya, Program Gerdu Kempling ini melibatkan pihak selain Pemerintah yang merupakan Kemitraan untuk menciptakan iklim sinergitas dalam Pembangunan Daerah. Adapun pihak-pihak yang

selama ini juga ikut melaksanakan program Gerdu Kempling di wilayah Kecamatan Pedurungan diantaranya STIFAR Yayasan Farmasi, Universitas Semarang dan STEKOM.

Realisasi pelaksanaan kebijakan sering diukur dengan memperbandingkan target yang dirumuskan dengan hasil nyata di lapangan. Berdasarkan hasil temuan penelitian ini ada beberapa informasi yang mampu menampilkan capaian yang dimaksud.

Hingga saat ini program Gerdu Kempling sudah terprogram dan sebagian sudah terlaksana di 4 kelurahan yaitu Palebon, Pedurungan Lor, Muktiharjo Kidul, dan Gemah. Sesuai data administrasi pada profil Kecamatan Pedurungan yang memiliki 12 Kelurahan, yang artinya sesuai cakupan wilayah program mencapai prosentase pelaksanaan 25 %.

Sedangkan mengenai capaian keluarga miskin yang menjadi sasaran kebijakan, berdasar data dari Kota Semarang pada Kecamatan Pedurungan setidaknya tercatat 6073 KK yang dikategorikan sebagai

keluarga miskin. Data ini diperoleh berdasarkan pada peta persebaran warga miskin Kota Semarang. Dan data pelaksanaan tahun 2012 setidaknya Program Gerdu Kempling di Kecamatan Pedurungan sudah dilaksanakan oleh kurang lebih 128 KK. Berdasar target Gerdu Kempling di Kota Semarang dengan pencapaian 2% dari jumlah keluarga miskin, tentunya Pelaksanaan Gerdu Kempling di Kecamatan Pedurungan juga telah memenuhi kriteria capaian yang baik.

Hampir semua agenda kegiatan mampu mencapai 100%, namun mengenai kegiatan perbaikan drainase, pelaksanaannya mencapai 80 %. (lampiran realisasi) Salah satu penyebabnya karena faktor alam atau kondisi cuaca dengan curah hujan yang tidak menentu. Sehingga dalam proses pengerjaannya di lapangan kondisi yang demikian menjadi sangat mengganggu penyelesaiannya.

Dalam pengukuran berhasil atau tidaknya sebuah tahapan pelaksanaan kebijakan, tentu dibutuhkan berbagai indikator untuk menilainya. Indikator-indikator ini

sebagai tolok ukur pencapaian sebuah pelaksanaan kebijakan. Setiap kebijakan tidak selalu langsung berhasil sesuai dengan perencanaan, sehingga dengan indikator sebagai cara menilai sebuah pelaksanaan kebijakan akan mampu membantu dalam mewujudkan pencapaian kebijakan. Dalam penelitian tentang implementasi Gerdu Kempling di Kecamatan Pedurungan dengan programnya Gerdu Kempling ini setidaknya ada empat faktor atau indikator pengelompokan pengamatan, yaitu Komunikasi, Sumber Kebijakan, Sikap, dan Struktur Birokrasi.

Pentingnya komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan diartikan oleh George C. Edwards III (dalam Agustino, 2006:150-151) bahwa komunikasi adalah transmisi gejala-gejala yang mungkin harus diteliti yaitu ketersediaan saluran komunikasi (media sosialisasi), kelancaran informasi program karena sarana atau media sosialisasi ini mempunyai peranan penting dalam proses penyebaran informasi mengenai suatu program. Selain itu jika penyaluran

komunikasi berjalan dengan baik maka dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula.

Berdasar hasil penelitian menunjukkan bahwa saluran komunikasi yang lancar, kejelasan informasi yang baik serta konsistensi informasi yang ditransmisikan oleh Kecamatan Pedurungan dalam kaitannya Program Gerdu Kempling mengindikasikan bahwa indikator Komunikasi ini dapat dipenuhi dan dijalankan dengan baik.

Sumber kebijakan selanjutnya sebagai indikator berikutnya dalam pelaksanaan program Gerdu Kempling. Sumber kebijakan ini meliputi sumber daya manusia yakni para pegawai maupun pelaksana lainnya. Pernyataan George C. Edwards III (dalam Agustino, 2006:151) mengenai staf memiliki kesinkronan dengan hasil temuan penelitian pada bab sebelumnya bahwa staf merupakan seseorang yang memiliki *skill* atau kemampuan yang memadai. Kemampuan pegawai harus diperhitungkan sedemikian rupa agar hasil yang didapat sesuai keinginan

semua pihak. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan adalah peningkatan *skill* atau kemampuan para pelaksana untuk melakukan program.

Dan sumber kebijakan yang bersifat non-manusia diantaranya sarana, hingga pembiayaan atau anggaran kegiatan. Mengenai pembiayaan sumber anggaran disesuaikan oleh jenis kegiatan dan pelaksanaannya. Jika dilaksanakan oleh jajaran SKPD Kota Semarang, pendanaan berasal dari Pemerintah baik berasal dari APBN, APBD Provinsi maupun Kota. Namun karena pelaksanaan program ini juga melibatkan pihak Kemitraan, sumber pembiayaan juga berasal dari pihak lain juga, seperti perbankan maupun swasta.

Sikap para pelaksana maupun sikap para masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan tak luput menjadi salah satu indikator pengamatan. Sikap merupakan faktor yang sangat penting dalam implementasi. Oleh karena itu George C. Edwards III (dalam

Agustino 2006:152-153) menyatakan apabila pelaksanaan suatu sikap kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Sehingga dalam prakteknya tidak menjadi bias.

Hasil penelitian menggambarkan bahwa para pelaksana kebijakan dalam proses mengemban tugasnya sudah dibekali dengan informasi dan pengetahuan tentang teknis pelaksanaan kebijakan di lapangan. Namun yang menjadi salah satu kendala dalam program Gerdu Kempling di Kecamatan Pedurungan ini yakni kesungguhan atau konsistensi masyarakat sebagai target atau sasaran yang masih belum baik. Agenda kegiatan yang dijalankan sering kali hanya terkesan aktif saat awal pelaksanaan saja. Untuk selanjutnya hanya beberapa masyarakat yang masih melaksanakan sesuai dengan tujuan awalnya. Tak jarang ditemukan masyarakat yang menghentikan proses usahanya walau hanya beberapa saat dijalankan. Sehingga pada indikator

sikap khususnya sikap masyarakat ini menjadi salah satu kendala dalam mewujudkan tujuan kebijakan yang telah dirumuskan.

Pedoman kinerja para pelaksana sesuai dengan standar pengoperasian akan memudahkan sistem dalam berjalan. Disamping memudahkan sistem pengawasan setidaknya juga mampu mendeteksi kesalahan sejak awal. Selain itu jika dikaitkan dengan pernyataan George C. Edwards III (dalam Agustino, 2006:153-154) mengenai prosedur pengoperasian standar bahwa suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada tiap harinya sesuai standar yang telah ditetapkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa prosedur standar yang sudah ada tidak sesuai dengan kenyataan dalam pelaksanaannya.

Konsep sinergitas yang dijalankan Pemerintah Kota Semarang dengan pihak Kemitraan terkait memudahkan menjangkau seluruh aspek pembangunan daerah khususnya program gerdu kempling. Pihak

Kemitraan ini disamping mendukung Pemerintah dalam pelaksanaan program Gerdu Kempling juga berfungsi sebagai pengawas. Hingga saat ini konsep sinergitas ini juga mampu berjalan dengan baik. Dengan kondisi demikian dapat diartikan bahwa indikator struktur birokrasi ini dapat dipenuhi oleh para pelaksana kebijakan.

Kendala Pelaksanaan Program Gerdu Kempling

Setiap pelaksanaan kebijakan tidak akan luput dari sebuah kendala atau permasalahan, bahkan selama implementasinya pun harus dinilai secara teliti, agar dalam mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Pendeteksian gejala kendala pelaksanaan implementasi kebijakan juga sangat penting dalam rangka meminimalisir kesalahan yang lebih besar serta mengawal tujuan program secara menyeluruh. Berdasar pada pembahasan sebelumnya, berikut beberapa kendala pelaksanaan Gerdu kempling di Kecamatan Pedurungan;

1. Faktor alam, cuaca yang sulit terdeteksi terutama mengenai

curah hujan yang tidak teratur menyulitkan pengerjaan kegiatan yang bersifat di luar ruangan. Hal ini terjadi pada program perbaikan drainase.

2. Faktor sikap masyarakat mengenai konsistensi pelaksanaan kebijakan. Dalam temuan di lapangan tidak sedikit masyarakat setelah mendapatkan pelatihan ketrampilan tidak segera diaplikasikan dalam kehidupannya. Sehingga terkesan program terlaksana hingga pelatihan ketrampilan saja.
3. Pentingnya keterkaitan wilayah. Hal ini terkait dengan pola pemasaran produk hasil usaha masyarakat, seperti hasil ketrampilan, ternak lele maupun usaha boga lainnya. Artinya disamping dipersiapkannya wilayah sentra produksi, hendaknya disiapkan pola daerah pemasarannya.

Kesimpulan

Gerdu Kempling merupakan bentuk dari produk Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2010 mengenai

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Implementasi Gerdu Kempling ini pun juga dilaksanakan di wilayah Kota Semarang, khususnya Kecamatan Pedurungan sebagai lokasi dalam penelitian ini.

Setidaknya sudah terprogram berbagai agenda kegiatan di 4 Kelurahan dari 12 Kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Pedurungan. Diantaranya Palebon, Pedurungan Lor, Muktiharjo Kidul, dan Gemah. Adapun agenda kegiatan yang sudah berlangsung hingga saat ini dan yang akan segera dijalankan yaitu Ternak Kambing dan Lele, Budidaya Ikan, Usaha Masakan dan Makanan, Pelatihan Rias dan Salon, Perbaikan Saluran Air, Perbaikan Rumah, Pengobatan Gratis.

Konsep sinergitas yang dijalankan Pemerintah Kota Semarang dengan pihak Kemitraan terkait memudahkan menjangkau seluruh aspek pembangunan daerah khususnya program gerdu kempling. Adapun kemitraan yang dimaksud meliputi PTN dan PTS, LSM, Perbankan,

BUMN, Tokoh masyarakat dan para pengusaha.

Selama pelaksanaan Gerdu Kempling ada kendala yang mesti segera diatasi dalam rangka mencapai tujuan yang lebih maksimal. Berdasar pengamatan indikator Implementasi Kebijakan yang meliputi komunikasi, sumber kebijakan, sikap dan struktur birokrasi. Salah satu kendalanya berasal dari indikator sikap. Yang menjadi salah satu kendala dalam program Gerdu Kempling di Kecamatan Pedurungan ini yakni kesungguhan atau konsistensi masyarakat sebagai target atau sasaran yang masih belum baik. Agenda kegiatan yang dijalankan sering kali hanya terkesan aktif saat awal pelaksanaan saja.

Saran

Didasarkan pada hasil penelitian maka pada bagian ini akan ditampilkan usulan berbagai saran pelaksanaan Gerdu Kempling khususnya di Kecamatan Pedurungan dan Kota Semarang pada umumnya ;

1. Adanya intensitas jalinan komunikasi kepada masyarakat

dalam pencapaian visi dan misi Gerdu Kempling secara berkelanjutan

2. Penyaluran program benar-benar diberikan kepada keluarga miskin yang mampu menjalankan kegiatan yang diagendakan
3. Peningkatan kerjasama semua elemen masyarakat dalam Gerdu Kempling.
4. Diberlakukannya penghargaan bagi masyarakat yang mampu menjadi pelopor dalam pelaksanaan program Gerdu Kempling.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Wahab Solichin. 1991. *Analisis Kebijakan: dari formulasi ke implementasi kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Bappeda Kota Semarang. 2008. *Advokasi dan Sinkronisasi Strategi Penanggulangan Kemiskinan Kota Semarang*.
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2004. *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Hikmat, Harry. 2001. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Jones, Charles O. 1991. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta : PT. Raja Hrasindo Persada.
- Korten, C. David. 2002. *Menuju Abad Ke-21: Tindakan Sukarela dan Agenda Global*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kusumanegara, Solahuddin. 2010. *Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gava Media.
- Nasution, Lutfi I. (ed). 1996. *Memahami dan Menanggulangi Kemiskinan di Indonesia- 70 Tahun Prof. Sajogyo*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana.
- Nawawi, Haddari. 1990. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press.
- Nugroho, Dr. Riant. 2009. *Public Policy*. Jakarta : PT. Elex Media Computindo.
- Subarsono, AG. 2005. *Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soegijoko, Budi Tjahjati S. dan BS Kusbiantoro (ed). 1997. *Bunga Rampai Perencanaan Pembangunan di Indonesia*. Bandung: Yayasan Soegijanto Soegijoko.
- Sugiono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sulistyani, Ambar Teguh. 2004. *Penyaluran Kemitraan dan Model- Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava media.

- Sumardi, Mulyanto & Hans- Dieter Evers. Ed. 1982. *Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok*. Jakarta : CV. Rajawali.
- Suwitri, Sri. 2009. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik: Transformasi Pikiran George Edwards*. Yogyakarta: YPAPI.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta : Media Presindo.
- Monografi Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 20011, 2012.
- http://balitbang.jatimprov.go.id/balitbang/publikasi/upload/penelitian_penanganan_pengangguran_dan_kemiskinan_di_jawa_timur.pdf
- <http://www.bappenas.go.id/index.php>
- http://eprints.undip.ac.id/24264/1/AMELIA_RENGGAPRATIWI.pdf
- http://eprints.undip.ac.id/18044/1/TRIMO_YULIANTO.pdf
- <http://sosekling.pu.go.id/attachments/article/350/Penelitian%20dan%20Pengembangan%20Pengelolaan%20PNPM%20Mandiri.pdf>
- http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdffiles/PROS_2008_MAK1.pdf
- http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdffiles/PROS_2008_MAK1.pdf
- <https://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/31419/4/Chapter%20520II.pdf>
- <http://ejournal.unsrat.ac.id>
- <http://www.masbied.com/2011/08/16/analisis-kebijakan-publik>
- <http://rositaajjah.wordpress.com/2011/05/11/pemberantasan-kemiskinan-di-negara-asean/>
- <http://bambang-rustanto.blogspot.com/2011/08/pengertian-kemiskinan.html>
- <http://kertyawitaradya.wordpress.com/2010/01/26/pemberdayaan-usaha-suatu-tinjauan-teoritis>